



Academic Freedom and Epistemic Responsibility in the Post-Truth Era

Winda Purwaning Suhairiya^{1*}, Agung Winarno², Subagyo³
Universitas Negeri Malang

Corresponding Author: Winda Purwaning Suhairiya

winda.purwaning.2504138@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Academic Freedom, Epistemic Responsibility, Post-truth, Epistemic Authority

Received : 13, September

Revised : 15, November

Accepted: 17, January

©2026 Suhairiya, Winarno, Subagyo:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This paper examines the relationship between academic freedom and epistemic responsibility as two normative pillars that underpin the university's function in maintaining the knowledge ecosystem, especially in the midst of epistemic disruption in the post-truth era. Philosophically, academic freedom is understood as a prerequisite for critical inquiry and truth-seeking, while epistemic responsibility demands rigor, honesty, and accountability in the production and dissemination of knowledge. However, the post-truth condition is characterized by the proliferation of disinformation, political polarization, and the erosion of scientific authority that shakes the epistemic foundations that have historically supported academic legitimacy. Through an analysis of contemporary concepts and literature, this paper suggests that universities must build an institutional ethics capable of synthesizing freedom and responsibility as the basis for the restoration of epistemic authority. This approach emphasizes the importance of an open discursive culture, scientific transparency, and critical education to form resilient epistemic agents.

Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Epistemik di Era Post-Truth

Winda Purwaning Suhairiya^{1*}, Agung Winarno², Subagyo³

Universitas Negeri Malang

Corresponding Author: Winda Purwaning Suhairiya

winda.purwaning.2504138@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebebasan Akademik, Tanggung Jawab Epistemik, Post-truth, Otoritas Epistemik

Received : 13, September

Revised : 15, November

Accepted: 17, Januari

©2026 Suhairiya, Winarno, Subagyo:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



ABSTRAK

Makalah ini mengkaji keterkaitan antara kebebasan akademik dan tanggung jawab epistemik sebagai dua pilar normatif yang menopang fungsi universitas dalam memelihara ekosistem pengetahuan, khususnya di tengah disrupsi epistemik era post-truth. Secara filosofis, kebebasan akademik dipahami sebagai prasyarat bagi penyelidikan kritis dan pencarian kebenaran, sementara tanggung jawab epistemik menuntut ketelitian, kejujuran, dan akuntabilitas dalam produksi serta penyebaran pengetahuan. Namun, kondisi post-truth ditandai oleh proliferasi disinformasi, polarisasi politik, dan erosi otoritas ilmiah yang menggoyahkan fondasi epistemik yang selama ini mendukung legitimasi akademik. Melalui analisis konsep dan literatur kontemporer, makalah ini menunjukkan bahwa universitas harus membangun etika kelembagaan yang mampu mensintesis kebebasan dan tanggung jawab sebagai dasar pemulihan otoritas epistemik. Pendekatan ini menekankan pentingnya budaya diskursif yang terbuka, transparansi ilmiah, dan pendidikan kritis untuk membentuk agen epistemik yang tangguh.

PENDAHULUAN

Kebebasan akademik merupakan salah satu prinsip normatif paling mendasar dalam filsafat pendidikan tinggi, karena menentukan kondisi epistemik yang memungkinkan tercapainya pengetahuan yang bernilai. Secara konseptual, kebebasan ini berakar pada gagasan bahwa pencarian kebenaran membutuhkan ruang otonom bagi para sarjana untuk menyelidiki, menilai, dan mengkritik tanpa campur tangan yang tidak sah. Otonomi intelektual tersebut memungkinkan berlangsungnya proses-proses epistemik yang esensial pengujian argumen, perdebatan terbuka, dan penolakan terhadap dogma yang secara kolektif membentuk fondasi bagi produksi pengetahuan yang dapat dipercaya (Haydel & Sirgo, 2015; Reichman, 2025). Tanpa kebebasan akademik, penyelidikan ilmiah rawan terhambat oleh sensor, penyeragaman, atau subordinasi intelektual yang melemahkan upaya pencarian kebenaran.

Dari perspektif filosofis, kebebasan akademik tidak hanya menjamin ruang berekspresi, tetapi merupakan prasyarat dialogis bagi dinamika pengetahuan. Pengetahuan berkembang melalui kontestasi argumen, keberagaman analitis, serta interaksi kritis antara perspektif yang berbeda. Diskursus terbuka memungkinkan revisi keyakinan, perluasan kerangka konseptual, dan munculnya interpretasi baru yang memperkaya horizon epistemik (Sun, 2025). Berpikir kritis sebagai syarat normatif dalam tradisi epistemologi ilmiah hanya dapat tumbuh dalam lingkungan yang tidak mengekang proses penalaran, baik melalui tekanan eksternal maupun kendala institusional internal. Karena itu, kebebasan akademik bukan sekadar hak, tetapi sebuah kondisi epistemik yang tak tergantikan.

Namun, kebebasan akademik tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab epistemik yang melekat padanya. Kewajiban epistemik menuntut para akademisi menggunakan kebebasan mereka secara bertanggung jawab melalui komitmen terhadap akurasi, ketelitian, kejujuran intelektual, dan kesadaran akan dampak sosial dari klaim pengetahuan. Relasi antara kebebasan dan tanggung jawab ini menimbulkan pertanyaan normatif yang tak terhindarkan: bagaimana kebebasan intelektual dapat dilindungi tanpa mengabaikan risiko kerusakan epistemik apabila kebebasan tersebut dijalankan tanpa kehati-hatian? Ketegangan ini menjadi inti dari diskusi mengenai batas sah intervensi institusional terhadap otonomi akademisi.

Dimensi etis dan politis dari kebebasan akademik semakin menonjol ketika diletakkan dalam konteks sosial kontemporer. Kebebasan akademik tidak hanya melindungi proses penalaran individual, tetapi juga menopang kelangsungan ruang diskursif yang terbuka bagi berbagai perspektif intelektual. Namun perlindungan tersebut semakin rentan karena mekanisme informal seperti sensor diri, tekanan institusional, serta efek “pendinginan”, ketika akademisi menahan diri dari mengeksplorasi isu-isu kritis demi menghindari risiko reputasional atau profesional (Bartell, 2025; Norris, 2025). Ancaman terhadap kebebasan akademik dapat muncul bukan sebagai larangan formal, melainkan melalui atmosfer yang menghambat keberanian intelektual.

Kebebasan akademik juga tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan budaya yang membentuknya. Di beberapa yurisdiksi, kebebasan akademik dilindungi sebagai hak hukum individual; di tempat lain, ia dipahami dalam kerangka nilai-nilai stabilitas sosial dan kepentingan kolektif (Marklein & Mai, 2020; Zhanyong & Yue, 2020). Variasi ini menunjukkan bahwa kebebasan akademik selalu terjalin dengan relasi kekuasaan yang menentukan bagaimana pengetahuan diartikulasikan dan dipraktikkan (Makwinja et al., 2024; Nurul Huda et al., 2020). Karena itu, analisis filosofis atas kebebasan akademik menuntut sensitivitas terhadap struktur sosial yang memengaruhi kondisi epistemik pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, filsafat kebebasan akademik berfungsi sebagai kerangka etis dan epistemik yang mengarahkan cara institusi pengetahuan seharusnya beroperasi. Ia menuntut keseimbangan antara otonomi dan tanggung jawab, antara kebebasan individu dan kepentingan komunitas ilmiah, serta antara pencarian kebenaran dan kesadaran akan dampak sosial pengetahuan. Dalam kerangka inilah pembahasan mengenai tanggung jawab epistemik institusional memperoleh urgensinya – terlebih dalam konteks krisis epistemik era post-truth, ketika otoritas universitas dan integritas pengetahuan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hanya dengan memahami keterkaitan antara kebebasan intelektual, tanggung jawab epistemik, dan kondisi epistemik masyarakat, universitas dapat menjalankan perannya sebagai penjaga kebenaran sekaligus pemelihara kesehatan epistemik public.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik merupakan prinsip normatif yang menjamin ruang intelektual bagi para sarjana untuk mengejar, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan tanpa intervensi yang tidak sah. Secara filosofis, konsep ini berakar pada tradisi liberal mengenai otonomi berpikir, di mana kebebasan intelektual dipandang sebagai syarat bagi perkembangan rasional individu dan kemajuan masyarakat. Akar historisnya dapat ditelusuri melalui prinsip *Lehrfreiheit* dan *Lernfreiheit* dalam model universitas Humboldt, yang menekankan perlindungan penyelidikan ilmiah dari kendali negara maupun tekanan eksternal (Reichman, 2025; Sun, 2025).

Tanggung Jawab Epistemik

Tanggung jawab epistemik merujuk pada kewajiban moral dan intelektual untuk memastikan bahwa proses perolehan, pembentukan, dan penyebaran pengetahuan berlangsung secara akurat, jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara filosofis, konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa pengetahuan bukan sekadar kumpulan informasi, tetapi entitas normatif yang terikat pada nilai-nilai seperti kebenaran, ketelitian, dan konsistensi rasional. Karena itu, setiap klaim pengetahuan harus didasarkan pada proses penalaran yang sah dan diuji melalui standar bukti serta metode yang dapat dipercaya. Ignatova (2020) menegaskan bahwa tanggung jawab epistemik membimbing individu untuk mempertimbangkan bagaimana pengetahuan

digunakan dalam pengambilan keputusan dan menuntut kehati-hatian dalam mengelola informasi teknis maupun ilmiah

Degradasi Kebenaran dan Tanggung Jawab Institusi Pengetahuan

Fenomena post-truth telah menciptakan tantangan epistemik yang mendalam bagi pendidikan tinggi. Istilah ini menandai kondisi sosial di mana fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan narasi emosional dan afiliasi identitas dalam membentuk opini publik. Mutasi epistemologis ini lahir dari perpaduan antara polarisasi politik, perkembangan teknologi digital, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis. Post-truth tidak sekadar menghadirkan banjir misinformasi, tetapi mengubah struktur epistemik masyarakat secara lebih radikal. Di dalamnya, klaim kebenaran tidak lagi diverifikasi melalui metode ilmiah atau argumentasi rasional; sebaliknya, mereka disaring berdasarkan resonansi emosional dan kesesuaian dengan identitas kelompok (McCaw et al., 2024).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konseptual. Sumber data meliputi artikel jurnal internasional bereputasi, buku akademik, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan kebebasan akademik, tanggung jawab epistemik, dan post-truth. Analisis dilakukan melalui penafsiran kritis terhadap konsep dan argumentasi teoritik untuk membangun sintesis normatif yang koheren.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik merupakan prinsip normatif yang menjamin ruang intelektual bagi para sarjana untuk mengejar, mengembangkan, dan menyebarkan pengetahuan tanpa intervensi yang tidak sah. Secara filosofis, konsep ini berakar pada tradisi liberal mengenai otonomi berpikir, di mana kebebasan intelektual dipandang sebagai syarat bagi perkembangan rasional individu dan kemajuan masyarakat. Akar historisnya dapat ditelusuri melalui prinsip *Lehrfreiheit* dan *Lernfreiheit* dalam model universitas Humboldt, yang menekankan perlindungan penyelidikan ilmiah dari kendali negara maupun tekanan eksternal (Reichman, 2025; Sun, 2025).

Sebagai landasan epistemologis, kebebasan akademik memainkan peran penting dalam pencarian kebenaran. Karena pengetahuan bersifat fallibilis dan terbuka untuk revisi, proses akademik memerlukan ruang di mana gagasan dapat dipertanyakan, diuji, dan disempurnakan melalui dialog rasional. Kebebasan intelektual memungkinkan para sarjana terlibat dengan beragam pandangan dan memperluas horizon interpretatif mereka, sehingga mekanisme korektif ilmu pengetahuan dapat berfungsi secara optimal (Findıklı, 2020). Dengan cara ini, kebebasan akademik tidak hanya melindungi ekspresi individu, tetapi menopang struktur epistemik yang membuat praktik ilmiah bersifat kritis dan berkembang.

Lingkungan yang bebas juga menjadi prasyarat bagi self-realization intelektual, yakni kemampuan para sarjana untuk mengembangkan kapasitas rasional melalui keterlibatan dalam perdebatan dan pertukaran ide yang terbuka (Daugela & Žydzūnaitė, 2024). Dimensi ini memperlihatkan bahwa kebebasan akademik bersifat ganda: ia merupakan hak individual yang melindungi kegiatan penelitian, pengajaran, dan ekspresi; sekaligus hak kolektif yang memungkinkan institusi menjaga standar ilmiah, melakukan penilaian sejawat, dan mengatur diri secara mandiri (Kabasakal Badamchi, 2022).

Urgensi kebebasan akademik semakin tampak ketika universitas beroperasi dalam lanskap yang dipenuhi tekanan administratif, kepentingan ekonomi, dan intervensi politik. Tekanan semacam ini dapat mengganggu keseimbangan antara akuntabilitas dan otonomi institusional. Kumar (2025) mencatat bahwa birokratisasi dan kendala fiskal dapat mengurangi ruang kebebasan akademisi, sementara Mtawa et al. (2025) menunjukkan bagaimana sensor diri dan efek “pendinginan” dapat melemahkan kualitas diskursus ilmiah dan menahan keberanian intelektual. Kebebasan akademik karenanya bukan kondisi yang hadir secara otomatis, tetapi sesuatu yang harus terus dipertahankan melalui budaya institusional yang mendukung penyelidikan kritis.

Dimensi otonomi intelektual baik pada tingkat individu maupun institusi menjadi inti dari prinsip ini. Pada tingkat individu, ia memungkinkan sarjana menyelidiki isu kontroversial dan mengajukan kritik yang tajam tanpa rasa takut. Pada tingkat kelembagaan, otonomi memungkinkan universitas menentukan kurikulum, agenda riset, dan standar ilmiahnya sendiri. Taylor (2024) menekankan bahwa keterbukaan pikiran dan komitmen etis dalam proses ilmiah menjadi bagian penting dalam menjaga vitalitas kebebasan akademik, khususnya ketika universitas harus menavigasi ketegangan antara kebebasan berbicara, inklusivitas, dan tuntutan moral-sosial.

Secara keseluruhan, kebebasan akademik bukan hanya mekanisme protektif, tetapi prinsip epistemologis yang menopang pencarian kebenaran serta vitalitas intelektual universitas. Fungsinya bersifat institusional dan sosial: ia memungkinkan penyelidikan ilmiah yang tidak terhambat, mendorong kritik terhadap ortodoksi intelektual, dan menjaga peran universitas sebagai lembaga pencari kebenaran dan penjaga diskursus rasional dalam masyarakat (Reichman, 2025). Dalam konteks kontemporer yang ditandai oleh disinformasi, polarisasi, dan krisis epistemik, kebebasan akademik memiliki arti yang lebih mendesak, karena tanpanya universitas kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi publiknya sebagai penopang rasionalitas dan pengetahuan yang dapat dipercaya.

Tanggung Jawab Epistemik

Tanggung jawab epistemik merujuk pada kewajiban moral dan intelektual untuk memastikan bahwa proses perolehan, pembentukan, dan penyebaran pengetahuan berlangsung secara akurat, jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara filosofis, konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa pengetahuan bukan sekadar kumpulan informasi, tetapi entitas normatif yang terikat pada nilai-nilai seperti kebenaran, ketelitian, dan konsistensi rasional. Karena itu, setiap klaim pengetahuan harus didasarkan pada proses penalaran yang sah dan diuji melalui standar bukti serta metode yang dapat dipercaya. Ignatova (2020) menegaskan bahwa tanggung jawab epistemik membimbing individu untuk mempertimbangkan bagaimana pengetahuan digunakan dalam pengambilan keputusan dan menuntut kehati-hatian dalam mengelola informasi teknis maupun ilmiah.

Pada tingkat individu, tanggung jawab epistemik berkaitan erat dengan komitmen membentuk keyakinan secara bertanggung jawab yakni memastikan bahwa kepercayaan yang dipegang ditopang oleh alasan memadai dan bukti yang dapat diuji. Dalam konteks lingkungan digital yang sarat disinformasi, Nedeljković & Pavličić, (2024) menyoroti keterkaitan antara kewajiban moral dan epistemik: individu tidak hanya dituntut untuk mengevaluasi sumber informasi secara kritis, tetapi juga menghindari kontribusi terhadap penyebaran klaim yang tidak berdasar. Dengan demikian, tanggung jawab epistemik berfungsi sebagai pengendali etis yang menjaga kualitas pengetahuan publik agar tidak terdegradasi oleh aliran informasi yang tidak terverifikasi.

Namun tanggung jawab epistemik tidak berhenti pada ranah individu. Institusi, khususnya universitas, memikul peran epistemik yang lebih luas karena mereka merupakan produsen, penjaga, sekaligus mediator pengetahuan dalam masyarakat. Peels et al. (2020) dan Lechner et al. (2025) mengidentifikasi lima tugas epistemik utama universitas: menjaga integritas riset, menanamkan kebajikan intelektual, merespons pertanyaan besar kemanusiaan, memelihara kajian humanistik, dan melayani masyarakat. Fungsi-fungsi ini memperlihatkan bahwa universitas tidak hanya menghasilkan fakta ilmiah, tetapi juga membentuk struktur nilai dan praktik yang menentukan bagaimana masyarakat memahami dan menggunakan pengetahuan.

Institusi memiliki kewajiban epistemik karena mereka mengatur kerangka konseptual yang menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Nikolaidis (2023) dan Mukwambo (2025) menegaskan bahwa universitas bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang inklusif dan adil, sehingga berbagai perspektif epistemik dapat berkembang tanpa dibatasi bias struktural. Tanggung jawab ini mencakup desain kurikulum, mekanisme evaluasi ilmiah, dan norma akademik yang tidak hanya menjunjung standar intelektual, tetapi juga memastikan bahwa proses produksi pengetahuan tidak mengecualikan kelompok tertentu. Penegakan tanggung jawab epistemik institusional merupakan prasyarat bagi kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem pengetahuan yang menjadi dasar keputusan demokratis (Kurtulmus, 2020).

Kegagalan menjalankan tanggung jawab tersebut memiliki konsekuensi serius. Dalam lanskap kontemporer yang ditandai oleh disinformasi, polarisasi, dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap sains, absennya tanggung jawab epistemik mempercepat fragmentasi sosial dan melemahkan legitimasi pengetahuan ilmiah. Sinatra (2026) dan McCaw et al. (2024) menunjukkan bahwa ketika institusi tidak menjaga keandalan informasi, masyarakat menjadi rentan terhadap keyakinan yang tidak berdasar, penolakan terhadap otoritas ilmiah, dan ketidakstabilan epistemik. Karena itu, tanggung jawab epistemik berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme internal untuk menjaga mutu akademik, tetapi juga sebagai dasar bagi ketahanan epistemik masyarakat.

Selain itu, tanggung jawab epistemik memiliki dimensi kolektif. Fleisher & Šešelja (2022) menekankan bahwa komunitas ilmiah maupun lembaga sosial berkewajiban mencegah kerusakan epistemik, seperti penyebaran klaim keliru atau terbentuknya keyakinan yang tidak dapat dibenarkan. Perspektif kolektif ini memperjelas bahwa praktik epistemik selalu tertanam dalam jaringan institusi, budaya akademik, dan mekanisme evaluatif yang membentuk proses produksi pengetahuan secara keseluruhan. Institusi harus memastikan kerangka regulatif dan profesional yang memungkinkan kolaborasi epistemik berjalan secara transparan dan etis.

Secara keseluruhan, tanggung jawab epistemik mencakup kewajiban individu untuk membentuk keyakinan secara bertanggung jawab dan kewajiban institusional untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik epistemik berjalan dengan baik. Keterkaitan antara akurasi, integritas, dan reliabilitas ilmiah menjadi landasan normatif prinsip ini. Dengan menjalankan tanggung jawab epistemik, universitas tidak hanya menjaga kualitas pengetahuan, tetapi juga memperkuat fondasi masyarakat demokratis yang bergantung pada informasi yang akurat dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Degradasi Kebenaran dan Tanggung Jawab Institusi Pengetahuan

Fenomena post-truth telah menciptakan tantangan epistemik yang mendalam bagi pendidikan tinggi. Istilah ini menandai kondisi sosial di mana fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan narasi emosional dan afiliasi identitas dalam membentuk opini publik. Mutasi epistemologis ini lahir dari perpaduan antara polarisasi politik, perkembangan teknologi digital, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis. Post-truth tidak sekadar menghadirkan banjir misinformasi, tetapi mengubah struktur epistemik masyarakat secara lebih radikal. Di dalamnya, klaim kebenaran tidak lagi diverifikasi melalui metode ilmiah atau argumentasi rasional; sebaliknya, mereka disaring berdasarkan resonansi emosional dan kesesuaian dengan identitas kelompok (McCaw et al., 2024).

Perubahan ini memiliki implikasi langsung terhadap kebebasan akademik. Secara historis, kebebasan akademik berfungsi dalam lingkungan epistemik yang relatif stabil lingkungan di mana masyarakat mengakui pentingnya bukti, penalaran, dan metode ilmiah sebagai dasar legitimasi klaim pengetahuan. Namun dalam budaya post-truth, fondasi tersebut melemah. Ketika publik tidak lagi menempatkan kebenaran ilmiah pada posisi hierarkis di atas opini, kebebasan akademik kehilangan landasan sosialnya. Kebebasan tersebut tetap penting secara normatif, tetapi pengaruhnya terhadap wacana publik menjadi semakin terbatas. Ketika ilmuwan tidak lagi dilihat sebagai sumber otoritatif, kebebasan mereka untuk meneliti dan menyampaikan temuan ilmiah tidak menjamin bahwa hasilnya akan diterima atau bahkan didengar. Di sinilah letak paradoks era post-truth: kebebasan akademik semakin diperlukan, tetapi pada saat yang bersamaan semakin rapuh.

Situasi ini diperburuk oleh perubahan ekologi informasi yang mengaburkan perbedaan antara informasi dan pengetahuan. Akses cepat terhadap data melalui platform digital sering disalahartikan sebagai bentuk kompetensi epistemik, seolah-olah “mengetahui sesuatu” dapat dicapai tanpa proses pembenaran yang ketat (Sirker, 2025; Zarman, 2018). Dalam epistemologi, pengetahuan mensyaratkan pembenaran (*justified true belief*), tetapi dalam budaya digital pembenaran dianggap tidak penting. Akibatnya, publik cenderung menyamakan opini pribadi dengan kesimpulan ilmiah, dan menganggap semua klaim sebagai setara nilainya.

Peran algoritma semakin mengintensifkan krisis ini. Media sosial memprioritaskan konten berdasarkan popularitas dan keterlibatan, bukan akurasi (Nakov & Da San Martino, 2021). Narasi emosional dan sensasional lebih mudah viral daripada temuan ilmiah yang kompleks. Echo chambers memperkuat keyakinan yang sudah ada sebelumnya, menghasilkan ruang epistemik tertutup yang meminimalkan kontak dengan informasi yang berlawanan (Cuevas-Badallo & Labrador-Montero, 2020). Dalam kondisi ini, kebenaran tidak lagi bersaing dengan kesalahan; ia bersaing dengan struktur teknologi yang mengatur apa yang terlihat dan apa yang penting bagi publik. Ketika algoritma menggantikan pakar sebagai penentu eksposur informasi, kebebasan akademik kehilangan prasyarat epistemiknya: audiens yang masih berkomitmen pada pencarian kebenaran.

Akibatnya, universitas menghadapi krisis legitimasi. Banyak kelompok masyarakat memandang perguruan tinggi sebagai institusi ideologis yang terputus dari kebutuhan nyata publik (Gill & Singh, 2020). Sentimen anti-intelektualisme menguat, dan akademisi dipandang sebagai elit politik alih-alih agen rasional pencari kebenaran. Ketika universitas dianggap bias secara politik, hasil penelitian bukan hanya dipertanyakan tetapi ditolak secara apriori. Bersamaan dengan itu, hilangnya “kerangka epistemik bersama” menyebabkan masyarakat tidak lagi memiliki basis nilai yang disepakati untuk menilai klaim pengetahuan (Belot et al., 2025). Di dalam konteks ini, kebebasan akademik bukan hanya terancam oleh tekanan eksternal, tetapi kehilangan makna karena struktur epistemik yang memberinya relevansi telah terdistorsi.

Namun, krisis post-truth tidak hanya mempengaruhi kebebasan akademik; ia juga memunculkan kebutuhan mendesak untuk menegaskan kembali tanggung jawab epistemik. Jika kebebasan akademik memberi ruang bagi penelitian yang otonom dan nondogmatis, tanggung jawab epistemik memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan untuk mengejar kebenaran secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab. Dalam situasi di mana publik meragukan integritas ilmiah, tanggung jawab epistemik berfungsi sebagai dasar moral yang dapat memulihkan kepercayaan. Universitas harus menunjukkan bahwa kebebasan akademik mereka bukanlah privilese tertutup, tetapi alat untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hubungan antara kebebasan akademik dan tanggung jawab epistemik di era post-truth bersifat ko-konstitutif. Kebebasan tanpa tanggung jawab kehilangan legitimasi, sementara tanggung jawab tanpa kebebasan kehilangan independensi epistemiknya. Post-truth memperjelas pentingnya relasi ini: ketika kebenaran direduksi menjadi opini, universitas perlu memperlihatkan bahwa klaim ilmiah berbeda karena berakar pada prosedur pembuktian yang ketat dan integritas akademik. Di sini, pendidikan memainkan peran sentral. Pendidikan tinggi bukan hanya harus menghasilkan penelitian, tetapi juga membentuk agen epistemik yang mampu mengidentifikasi bias, memahami proses verifikasi ilmiah, dan bernalar secara kritis dalam menghadapi klaim informasi (Mohammed et al., 2024). Pendidikan kritis menjadi landasan untuk membangun ketahanan epistemik dalam masyarakat.

Oleh karena itu, menghadapi era post-truth memerlukan pembentukan etika kelembagaan yang menyatukan kebebasan akademik dan tanggung jawab epistemik sebagai prinsip operasional universitas. Etika ini menuntut universitas menegakkan budaya diskursus yang tanpa dogma, mendorong keterbukaan terhadap perbedaan pandangan, dan memfasilitasi deliberasi yang berbasis alasan. Nilai-nilai seperti intellectual humility dan keterbukaan terhadap pluralitas epistemik harus menjadi bagian dari habitus akademik (Van Dorn, 2020). Dengan menanamkan nilai-nilai ini, universitas dapat menghidupkan kembali ruang deliberatif yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi epistemik mereka.

Etika kelembagaan juga menuntut universitas memperkuat komunikasi publik untuk menjembatani jurang epistemik antara ilmuwan dan masyarakat. Ketika publik tidak memahami bagaimana pengetahuan ilmiah diproduksi dan diverifikasi, mereka cenderung melihat penelitian sebagai opini bersaing. Menjelaskan proses ilmiah, memaparkan keterbatasan penelitian secara jujur, dan berkomunikasi dengan cara yang dapat diakses menjadi bagian dari tanggung jawab epistemik institusi akademik (Nikolarea, 2025). Komunikasi ilmiah bukan lagi fungsi tambahan, tetapi unsur struktural dari legitimasi epistemik universitas.

Lebih jauh lagi, universitas perlu membangun kemitraan epistemik dengan komunitas melalui penelitian partisipatif dan kolaboratif. Ketika masyarakat berperan sebagai co-producers of knowledge, jarak epistemik antara akademisi dan publik menyempit, dan kontribusi ilmiah memperoleh relevansi sosial yang lebih kuat (Taliep et al., 2025). Langkah ini dapat mengurangi persepsi bahwa universitas adalah institusi elitis dan mempertegas komitmennya terhadap kesejahteraan kolektif.

Secara keseluruhan, era post-truth menuntut universitas untuk menegaskan kembali perannya sebagai institusi moral-epistemik. Kebebasan akademik harus dipahami bukan hanya sebagai hak akademisi, tetapi sebagai mekanisme kolektif untuk mempertahankan pencarian kebenaran dalam masyarakat. Tanggung jawab epistemik harus dipandang sebagai komitmen institusional untuk menjaga integritas, akurasi, dan relevansi pengetahuan. Dengan mensintesis kedua prinsip ini dalam etika kelembagaan yang kuat, universitas dapat memulihkan otoritas epistemiknya dan memelihara ekosistem pengetahuan yang sehat di tengah lanskap post-truth yang semakin tidak stabil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Makalah ini menunjukkan bahwa kebebasan akademik dan tanggung jawab epistemik merupakan dua prinsip yang saling bergantung dan membentuk fondasi moral-intelektual bagi keberlangsungan pendidikan tinggi. Kebebasan akademik menyediakan ruang normatif bagi penyelidikan bebas, otonomi intelektual, dan keberanian ilmiah untuk menantang dogma. Pada saat yang sama, tanggung jawab epistemik memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan secara etis melalui komitmen terhadap kebenaran, ketelitian metodologis, dan kejujuran intelektual. Keduanya membentuk struktur dasar yang memungkinkan universitas menjalankan perannya sebagai institusi penghasil pengetahuan yang dapat dipercaya.

Namun, keberlanjutan kedua prinsip tersebut menghadapi tantangan serius dalam kondisi epistemik kontemporer. Dinamika post-truth telah menggeser orientasi publik dari pencarian kebenaran menuju afinitas emosional dan preferensi identitas, sehingga melemahkan struktur epistemik yang selama ini menopang legitimasi akademik. Dalam lanskap seperti ini, universitas tidak lagi beroperasi dalam ruang wacana yang stabil, melainkan dalam ekosistem informasi yang terfragmentasi, di mana klaim ilmiah dapat dengan mudah disejajarkan dengan opini populer. Erosi kepercayaan ini membuat kebebasan akademik kehilangan resonansi publiknya, dan tanggung jawab epistemik semakin sulit dijalankan, karena proses verifikasi ilmiah tidak selalu dihargai dalam budaya yang mengutamakan kecepatan, sensasi, dan konfirmasi keyakinan pribadi. Kondisi tersebut menuntut universitas untuk tidak sekadar menegaskan otoritasnya, tetapi membangun kembali prasyarat epistemik yang memungkinkan klaim pengetahuan ilmiah diterima sebagai bagian dari orientasi bersama menuju kebenaran.

Dengan demikian, tugas pendidikan tinggi di era post-truth bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjaga kondisi epistemik yang memungkinkan kebenaran tetap menjadi nilai publik. Pemeliharaan ekosistem pengetahuan ini merupakan tantangan moral sekaligus kewajiban institusional. Hanya dengan menggabungkan kebebasan akademik dan tanggung jawab epistemik secara menyeluruh, universitas dapat memastikan bahwa pencarian kebenaran tetap hidup sebagai komitmen kolektif dan bukan sekadar ideal abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartell, S. M. (2025). PhDead: The Erosion of Academic Freedom by Ignorance. *Journal of Higher Education Policy and Leadership Studies*, 6(1), 9–33. <https://doi.org/10.61186/johepal.6.1.9>.
- Belot, M., Cassar, L., & Ströhlein, K. (2025). The role of universities in society. *Science Advances*, 11(45), eadx2929. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adx2929>.
- Cuevas-Badallo, A., & Labrador-Montero, D. (2020). Democracy and inquiry in the post-truth era: A pragmatist solution. *Disputatio (Spain)*, 9(13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3567169>.
- Daugela, M., & Žydzūnaitė, V. (2024). Academic Self-Realization of Researchers in Higher Education: Phenomenological Research-Based Evidence. *Education Sciences*, 14(8), 823. <https://doi.org/10.3390/educsci14080823>.
- Findıklı, B. (2020). A Republic of Scholars or Scholars of the Republic? Reflections on the Predicaments of Academic Freedom and University Autonomy in Turkey. *Higher Education Quarterly*, 76(3), 537–547. <https://doi.org/10.1111/hequ.12287>.
- Fleisher, W., & Šešelja, D. (2022). Responsibility for Collective Epistemic Harms. *Philosophy of Science*, 90(1), 1–20. <https://doi.org/10.1017/psa.2022.9>.
- Gill, S. K., & Singh, G. (2020). Ideologies and their impact on higher education. *Economic and Political Weekly*, 55(15), 19–21.
- Haydel, J., & Sirgo, H. B. (2015). Academic Freedom. In *The Encyclopedia of Civil Liberties in America: Volumes One-Three* (Vol. 1, pp. 4–7). <https://doi.org/10.4324/9781315699868-6>.
- Ignatova, N. U. (2020). Epistemic Responsibility of Industrial Enterprise Engineer. *Iop Conference Series Materials Science and Engineering*, 966(1), 012118. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/966/1/012118>.
- Kabasakal Badamchi, D. (2022). Academic freedom: How to conceptualize and justify it? *Philosophy and Social Criticism*, 48(4), 619–630. <https://doi.org/10.1177/01914537211072888>.
- Kumar, R. (2025). Silenced Professoriate. *Brock Education Journal*, 34(1). <https://doi.org/10.26522/brocked.v34i1.1186>.
- Kurtulmus, F. (2020). The Epistemic Basic Structure. *Journal of Applied Philosophy*, 37(5), 818–835. <https://doi.org/10.1111/japp.12451>.
- Lechner, I. M., Mokkink, L. B., de Ridder, G. J., van Woudenberg, R., Bouter, L. M., & Tijdink, J. K. (2025). The core epistemic responsibilities of universities: Results from a Delphi study. *Accountability in Research*, 32(2), 99–119. <https://doi.org/10.1080/08989621.2023.2255826>.

- Makwinja, S. M., Kayange, G. M., & Mpekansambo, L. M. (2024). Navigating Between Liberal And Communitarian Perspectives Of Academic Freedom In Africa. In *Academic Freedom in Africa: The Struggle Rages On* (pp. 21–40). <https://doi.org/10.4324/9781003516248-3>.
- Marklein, M. B., & Mai, V. T. (2020). The Construction, Deconstruction, and Reconstruction of Academic Freedom in Vietnamese Universities. In *International and Development Education* (pp. 207–226). https://doi.org/10.1007/978-3-030-46912-2_11.
- McCaw, C. T., Ryan, M., & Lunn Brownlee, J. (2024). Educators, epistemic reflexivity and post-truth conditions. *Journal of Educational Change*, 25(3), 455–484. <https://doi.org/10.1007/s10833-023-09499-1>.
- Mohammed, S., Grundy, Q., & Bytautas, J. (2024). Addressing Post-Truth in the Classroom: Towards a Critical Pedagogy. *Teaching and Learning Inquiry*, 12. <https://doi.org/10.20343/teachlearninqu.12.24>.
- Mtawa, M. N., Kahangwa, G., & Ngidos, L. (2025). The Conundrum of Academic Freedom in Africa: Can Academics in Contexts Such as Tanzania Have Absolute Academic Freedom? *South African Journal of Higher Education*, 39(4). <https://doi.org/10.20853/39-4-7508>.
- Mukwambo, P. (2025). Educational Institutions and Epistemic Freedom: The Experiences of Second-generation Zimbabwean Immigrants in England. *Journal of Human Development and Capabilities*, 26(4), 581–603. <https://doi.org/10.1080/19452829.2025.2548817>.
- Nakov, P., & Da San Martino, G. (2021). Fake News, Disinformation, Propaganda, Media Bias, and Flattening the Curve of the COVID-19 Infodemic. *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 4054–4055. <https://doi.org/10.1145/3447548.3470790>.
- Nedeljković, A., & Pavličić, J. (2024). The Moral Dimension of Epistemic Practices in Online Environments. *Theoria Beograd*, 67(4), 167–176. <https://doi.org/10.2298/theo2404167>.
- Nikolaidis, A. C. (2023). Epistemic injustice in education: exploring structural approaches, envisioning structural remedies. *Journal of Philosophy of Education*, 57(4–5), 842–861. <https://doi.org/10.1093/jopedu/qhad074>.
- Nikolarea, E. (2025). A SWOT Analysis of the Communication of Trans- and Inter-Disciplinary Research in Education and Society. *Proceedings of World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, WMSCI*, 513–517. <https://doi.org/10.54808/WMSCI2025.01.513>.
- Norris, P. (2025). Cancel culture: Heterodox self-censorship or the curious case of the dog which didn't bark. *International Political Science Review*, 46(3), 422–441. <https://doi.org/10.1177/01925121241269157>.
- Nurul Huda, S. A., Kartowagiran, B., Setiawan, C., & Putranta, H. (2020). Academic freedom: Understanding and experience of higher education lecturers in Indonesia. *Universal Journal of Educational Research*, 8(10), 4671–4683. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081036>.

- Peels, R., van Woudenberg, R., de Ridder, J., & Bouter, L. (2020). Academia's Big Five: A normative taxonomy for the epistemic responsibilities of universities. *F1000Research*, 8. <https://doi.org/10.12688/f1000research.19459.2>.
- Reichman, H. (2025). The Foundations of Academic Freedom. *European Review*, 33(S1), S14-S27. <https://doi.org/10.1017/s1062798725000122>.
- Sinatra, G. M. (2026). The erosion of trust is contributing to science denial. *Current Opinion in Psychology*, 67. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2025.102214>.
- Sirker, S. (2025). Evidentiality and Testimonial Knowledge. In *Language and the World: Essays in Honor of Franson Manjali* (pp. 87-99). https://doi.org/10.1007/978-981-96-6271-5_8.
- Sun, J. C. (2025). Academic Freedom in US Higher Education: Rights Emergent From the Law and the Profession. *Encyclopedia*, 5(2), 64. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia5020064>.
- Taliep, N., Ismail, G., & James, S. (2025). Bridging The Gap: Community Engagement As A Catalyst For University-community Collaboration. *Community Psychology in Global Perspective.*, 11(2), 84-105. <https://doi.org/10.1285/i24212113v11i2p84>.
- Taylor, R. M. (2024). Taking Seriously Campus Debates Surrounding Invited Speakers: Open-Mindedness and the Ethics of Inquiry in Higher Education. *Teachers College Record*, 126(3), 86-109. <https://doi.org/10.1177/01614681241261174>.
- Van Dorn, K. (2020). Addressing perceptions of bias in the ivory tower. *Good Society*, 29(1-2), 119-137. <https://doi.org/10.5325/goodsociety.29.1-2.0119>.
- Zarman, W. (2018). Information and Knowledge in Epistemology Perspective. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 407(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/407/1/012121>.
- Zhanyong, Q., & Yue, D. (2020). A Study of the Practical Dilemmas and Safeguarding Strategies of Universities in Mainland China in Exercising Academic Freedoms. *Chinese Education and Society*, 53(4), 212-221. <https://doi.org/10.1080/10611932.2020.1823806>.